

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS
MELALUI
PENELITIAN PENDIDIKAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	21-9-2006
SUMBER HARGA :	Hadiah
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	189/K/2006-142/2f
KLASIFIKASI :	305.3 Fat m: 2

Oleh:

DRA. FATMARIZA, M.Hum



DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL
*PERAN PENELITIAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS INSTRUKSIONAL
PENDIDIKAN*

DISELENGGARAKAN OLEH LEMLIT UNIVERSITAS NEGERI PADANG
BEKERJASAMA DENGAN LEMLIT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DI PADANG, TANGGAL 8 DESEMBER 2003



SERTIFIKAT



Diberikan kepada:

Dra. Fatmawiza. H., M.Hum

atas partisipasi aktifnya sebagai

Pemakalah

dalam **SEMINAR NASIONAL**

"PERAN PENELITIAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN"

Yang diselenggarakan di Universitas Negeri Padang pada hari Senin tanggal 8 Desember 2003 atas kerjasama antara Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta

Padang, 8 Desember 2003

Ketua LP UNP

Dr. H. Agus Irianto

MENGETAHUI:

Dr. Dc. Azwar Ananda, MA

NIP. 131 584 117

Ketua LP UNJ

Dr. Syarifuddin

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PENELITIAN PENDIDIKAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER*

Oleh: Fatmariza**

A. Pendahuluan

Salah satu agenda pokok yang direkomendasikan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* disingkat *International IDEA* (2000) untuk demokratisasi di Indonesia adalah membenahi persoalan ketidaksetaraan gender (*gender inequity*) dalam masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa perempuan Indonesia dilihat dari perspektif keadilan dan kesetaraan gender masih tertinggal dari rekan laki-lakinya dalam berbagai bidang kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun negara.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, sebelumnya secara khusus *The Beijing Declaration and The Platform for Action, 1996 (Gender, Education and Development, International Centre of the ILO)* dengan tegas menyatakan bahwa: "Pendidikan merupakan Hak Azasi manusia dan merupakan alat penting bagi pencapaian **kesetaraan**, perkembangan, dan kedamaian...Pendidikan yang **tidak diskriminatif** akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas".

Sehubungan dengan hal itu, Dewey dalam Radjab (2002) menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi sosial. Sifat transformasi itu dimungkinkan karena melalui pengajaran di sekolah yang terorganisir, orang dapat mengenal kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri, didorong untuk mempertanyakan berbagai asumsi, serta mencari kebenaran. Arah pendidikan menurut Dewey bermaksud untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia seluas-luasnya sehingga mereka mampu berfikir kritis, dan dapat memberikan penilaian sendiri atas berbagai situasi yang dihadapinya. Selanjutnya mereka dapat merefleksikannya, dan kemudian menjadikannya sebagai landasan untuk mengintegrasikan diri, dan bahkan ikut membentuk realitas itu sendiri.

*Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peran Penelitian dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ di Padang tgl 8 Desember tahun 2003

** Dosen /Peneliti Pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

Dengan kata lain, pendidikan idealnya akan mengarahkan manusia tidak hanya memiliki kemampuan adaptif terhadap lingkungannya, tetapi dapat **merekonstruksi**, dan bahkan **mendekonstruksinya** sehingga memungkinkan manusia hidup dalam tatanan masyarakat yang demokratis, yang menyediakan peluang yang sama bagi setiap orang tanpa ada perbedaan kelas, ras, dan jenis kelamin.

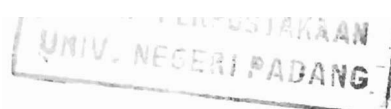
Persoalannya menurut Arivia (2002), adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk atau konstruksi sosial. Celaknya ada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu **perempuan** yang tidak selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal adalah lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan di dalam keluarga, masyarakat, dan negara terutama terhadap perempuan yang menurut (Fakih, 1996) termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja ganda, dan kekerasan.

Russel dalam Hamilton dan Barrets, eds sebagaimana dikutip Diarsi (1990) menyatakan bahwa kurikulum sekolah melalui materi pelajaran atau isi buku pelajaran, bimbingan karir, interaksi antara guru dan murid di dalam kelas secara tidak disadari telah melestarikan ideologi gender yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Pelestarian ideologi gender tersebut masih berlangsung sampai saat ini, termasuk melalui kebijakan dan aturan yang berlaku di sekolah. Stereotipe yang ada dalam buku-buku pelajaran, media pengajaran, sikap dan perlakuan guru, serta kebijakan dan aturan yang bias gender lebih banyak terjadi di **Sekolah Dasar**. Namun tidak dapat disangkal persoalan tersebut juga masih berlanjut pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi.

Sebagai jenjang pertama pendidikan sekolah, sosialisasi di **Sekolah Dasar** baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh signifikan terhadap pengukuhan persepsi konservatif siswa laki-laki dan perempuan dalam berfikir,

*Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peran Penelitian dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ di Padang tgl 8 Desember tahun 2003

** Dosen /Peneliti Pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP



bersikap, dan bertingkah laku baik terhadap dirinya maupun dalam berelasi dengan orang lain yang cenderung menimbulkan ketidakadilan.

Sehubungan dengan begitu pentingnya peran dan fungsi sekolah mulai dari tingkatan **Sekolah Dasar** dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat yang lebih luas, maka upaya mengungkap bias gender dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah merupakan upaya yang *urgen* untuk dilakukan. Sehingga sedini mungkin dapat diketahui, dan diupayakan perbaikan terhadap berbagai komponen pendidikan. Melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah dapat dimulai proses demokratisasi, yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang demokratis. Di sinilah letak pentingnya upaya penelitian, dalam hal ini penelitian pendidikan yang berperspektif gender.

B. Gender Sebagai Konstruksi Budaya

Kebudayaan mencakup bahasan yang amat luas. Koentjaraningrat (1990) secara lebih jelas menyatakan bahwa kebudayaan meliputi keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupannya yang kemudian dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Gender yang merupakan pemilahan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial merupakan bahagian dari budaya tersebut. Gender mencakup sistem gagasan, perlakuan, dan bahkan teknologi yang bias gender (Muthali'in, 2001).

Sebagai konstruksi budaya, gender dapat dijumpai di banyak budaya etnis di Indonesia. Diantaranya dalam budaya Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Madura, Batak, dan Bugis dengan populasi pendukung budaya yang relatif banyak secara mudah dapat dijumpai konstruksi gender. Dalam budaya etnis tersebut semuanya menempatkan perempuan untuk bekerja di sektor domestik, sementara laki-laki di sektor publik (Soewondo, 1984).

Konstruksi gender ditemukan pula pada budaya agama resmi di Indonesia. Meski masih menjadi diskusi yang menarik dalam rangka melacak apakah bias gender dalam agama tersebut berasal dari watak agama itu sendiri ataukah berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan dalam konteks

* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2003 di Padang

** Dosen/Peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

budaya?. Terlepas dari perdebatan tersebut, yang pasti dalam budaya agama-agama tersebut dapat dengan mudah ditemukan konstruksi bias gender. Dalam budaya agama Islam misalnya, (Muthali'in, 2001) dalam kesaksian nilai perempuan hanya setengah dari kaum laki-laki. Kemudian, penafsiran tentang ayat bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, cenderung menyebabkan perempuan tersubordinasi.

Penempatan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik pada umumnya berdasarkan asumsi bahwa perempuan secara fisik lemah, namun mempunyai kesabaran dan kelembutan, sementara laki-laki memiliki fisik lebih kuat. Atas dasar itu berlakulah pembagian peran, perempuan dipandang lebih sesuai untuk bekerja di rumah, mengasuh anak, mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan suami/laki-laki di rumah. Sementara laki-laki lebih sesuai bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Sosialisasi pembedaan peran ini telah berlangsung sejak dini mulai dari keluarga, dan dilanjutkan di sekolah maupun di dalam masyarakat. Pembedaan peran yang demikian, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, berakibat kurang menguntungkan, dan bahkan tidak jarang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Lebih jauh Fakih (1996) mensinyalir, pembedaan peran yang dikategorikan sebagai feminin dan maskulin pada gilirannya juga akan menyebabkan munculnya ketidakadilan di dalam masyarakat terutama terhadap perempuan.

C. Sosialisasi Nilai Budaya

Budaya suatu masyarakat atau bangsa akan disosialisasikan agar generasi penerusnya memiliki cara berfikir, berperasaan, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut (Salim, 1999). Dengan demikian, nilai-nilai budaya gender yang berwujud cara berfikir, berperilaku, dan berperasaan yang terdapat dalam budaya nasional juga akan ikut disosialisasikan ketika berlangsung sosialisasi kebudayaan nasional yang merupakan wujud dari kebudayaan daerah (etnis) dan agama. Salah satu institusi budaya yang melakukan sosialisasi tersebut adalah sekolah.

* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2003 di Padang

** Dosen/Peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

Sekolah sebagai institusi budaya dalam penyelenggaraan pembelajarannya terikat secara ketat dengan aturan-aturan pemerintah. Sentralisasi melalui dinas pendidikan (Dinas Diknas) baik pusat, propinsi, Kabupaten/Kota, mewarnai hampir seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sentralisasi memudahkan negara/pemerintah untuk memanfaatkan sekolah sebagai alat sosialisasi ideologi yang dianut pemerintah. Jelasnya, budaya gender sebagaimana yang tercermin dalam realitas masyarakat dan kebijakan negara disosialisasikan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Penelitian menemukan adanya bias gender dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam buku-buku pelajaran, khususnya di Sekolah Dasar (SD) ditemukan kalimat-kalimat seperti: "Ibu memasak di dapur", "Ani membantu Ibu mencuci piring", "Bapak mencangkul di sawah", "Amir membantu ayah di kebun". Kalimat-kalimat tersebut secara konsisten mengajarkan pembagian kerja secara dikotomis yang tegas antara perempuan dan laki-laki. Ibu dan Ani mengacu pada perempuan dikonstruksikan untuk bekerja di sektor domestik, sementara bapak dan Amir mengacu pada laki-laki memang seharusnya beraktifitas di luar rumah atau di sektor publik. Selanjutnya dilihat dari kategori feminin-maskulin juga ditemukan kalimat dalam sebuah wacana seperti " Ibu tak dapat menahan tangisnya, ia meratap melarau-larau..". "Kami (anak laki-laki dan ayahnya) masuk ke ruang tengah. Di luar para lelaki sibuk membagi pekerjaan".

Di samping itu, penelitian yang dilakukan Klinken terhadap buku pelajaran IPS dan PMP menyimpulkan bahwa gambaran stereotipe peran laki-laki dan perempuan dalam buku-buku pelajaran menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan tradisional dilakukan oleh perempuan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang menggunakan mesin atau alat-alat industri modern dilakukan oleh laki-laki (Diarsi, 1990).

Nilai-nilai yang ditanamkan melalui materi pelajaran sebagaimana digambarkan di atas, ditambah dengan sosialisasi yang diperoleh anak dalam keluarga, dan media massa seperti TV serta media cetak membentuk gambaran ideal yang harus dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Ideal ini

- Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2003 di Padang
- Dosen/Peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

memberi arah pada pilihan bidang studi yang diambil oleh siswa pada jenjang pendidikan selanjutnya. Pada tahap perkembangan pendidikan selanjutnya, gambaran tersebut semakin mencolok bahwa penguasaan keterampilan teknologi canggih dan ilmu pengetahuan modern didominasi oleh laki-laki. Sebaliknya pengetahuan keterampilan rumah tangga, pelayanan dan jasa, pengetahuan moral dan watak manusia serta pengetahuan lainnya yang terkait menjadi dunia khas perempuan. Kondisi itu pada akhirnya menentukan peran dan posisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Sebagaimana dikelukakan di atas, menurut Fakhri (1996) hal tersebut cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan di dalam masyarakat baik pada laki-laki dan terutama terhadap perempuan.

D. Proses Pembelajaran Di Sekolah

Proses pembelajaran merupakan bahagian terpenting dari keberadaan sekolah. Proses ini menjadi media transfer dari berbagai misi yang diemban oleh sekolah, termasuk di dalamnya sosialisasi kebudayaan masyarakat. Proses pembelajaran dan keseluruhan komponennya merupakan bahagian yang esensial dalam kehidupan sekolah.

Secara lebih luas dan lugas dikemukakan oleh Hamalik (1995) bahwa pembelajaran adalah merupakan kombinasi yang meliputi unsur-unsur manusia, materi, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusia adalah mereka yang terlibat dalam sistem pembelajaran yang terdiri dari guru, siswa, dan tenaga lainnya. Materi meliputi buku-buku, fotografi, slide, audio, dll. Adapun fasilitas meliputi ruang kelas, perlengkapan lainnya. Sedangkan prosedur meliputi metode penyampaian, interaksi, dan lain lain. Jadi proses pembelajaran meliputi keseluruhan aktivitas dan komponen, baik langsung maupun tidak langsung di luar maupun di dalam kelas yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sosialisasi nilai gender dalam proses pembelajaran di sekolah juga akan sangat terkait dengan berbagai komponen proses belajar mengajar tersebut.

E. Faktor Penyebab langgengnya Bias Gender dalam Pendidikan

Sebagai perbandingan, di Inggris kelompok yang bekerja dalam bidang pendidikan dan gender dengan sebutan GIST (*Girls into Science and Technology Project*), dalam penelitiannya menemukan beberapa hambatan dalam membantu para guru untuk memahami masalah gender di sekolah, diantaranya sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini:

“Yang paling menghambat adalah bahwa para guru sebagian besar tidak melihat persoalan minimnya representasi anak perempuan sebagai suatu persoalan. Atau mencoba untuk mengkaji ulang nilai-nilai yang menghambat anak perempuan atau nilai-nilai yang mereka anut sendiri dan sikapnya terhadap anak perempuan. Pada umumnya guru akan mengatakan bahwa kesetaraan itu penting, dan menganggap sudah ada dan tidak ada perbedaan perlakuan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kalaupun ada perbedaan dianggap wajar karena dikaitkan dengan kodrat. Karena para guru tidak ini tidak melihat adanya persoalan maka mereka tidak merasa perlu untuk mencari solusi (Kelly, dalam Arivia, 2002)

Untuk menjelaskan lebih lanjut fungsi pendidikan sekolah yang tidak mencerminkan pembaharuan itu dapat dikaitkan dengan konsep hegemoni kekuasaan dari Antonio Gramsci dalam Budiman (1981). Menurutnyanya, kekuasaan hegemonik berarti kekuasaan dari sekelompok masyarakat yang diterima dan dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Diperolehnya legitimasi itu dimungkinkan karena program ideologis kelompok tersebut dikemas sedemikian rupa, sehingga seakan-akan benar-benar berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, kepentingan kelompok dominan itu diartikulasikan sebagai kepentingan seluruh anggota masyarakat. Artikulasi dari program tersebut di samping menggunakan jaringan birokratis dan teknokratis, juga memakai media pendidikan sebagai sarannya. Demikian halnya dengan ideologi gender. Kelompok dominan akan berupaya untuk mempertahankan sistem gender yang sudah ada dan membuat seakan-akan kondisi tersebutlah yang paling baik untuk masyarakat.

Nampaknya konsep Gramsci ini memiliki relevansi untuk menjelaskan mengapa ideologi patriarki tetap eksis dan malah menjadi meluas dan dominan,

* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2007 di Padang

** Dosen/Peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

karena ternyata program-programnya diintegrasikan ke dalam kurikulum pada berbagai jenjang dan bidang pendidikan sekolah. Bahkan secara lebih keras Paulo Freire dan Ivan Illich menuduh bahwa pendidikan sekolah itu merupakan alat penindasan. Menurut mereka, metode didaktik, orientasi, asumsi-asumsi dasar, dan kegunaan hakiki pendidikan sekolah sama sekali tidak terfokus pada proses pembebasan manusia. Sebaliknya, praktek pendidikan itu mengarah langsung pada upaya-upaya untuk memperkuat struktur sosial yang timpang. Dalam hal ini termasuk struktur sosial gender yang timpang. Sehingga kepentingan-kepentingan kelompok yang tersubordinasi, baik secara ekonomi, politik, budaya, gender, dan golongan minoritas tidak terepresentasi dalam sistem persekolahan. Bila demikian yang terjadi, maka pendidikan sekolah tersebut diskriminatif, memihak dan akan selalu menguntungkan kelompok dominan, sementara kelompok subordinat menjadi semakin termarginalisasikan.

Sebenarnya pendidikan sekolah itu (apalagi bagi perempuan) bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, memang ia memiliki daya dorong pada perubahan, bisa melahirkan orang-orang kritis, kreatif dan mandiri. Tetapi di sisi lain, ia pun mempunyai fungsi memperkuat dan melestarikan struktur masyarakat yang timpang. Di sinilah terjadi tarik-menarik antara kekuatan yang mendorong pada perubahan dengan kekuatan yang mempertahankan status quo. Mana yang akan dominan, watak transformatifnya atau karakter konservatifnya? Di sinilah letak peran strategis guru sebagai agen sosialisasi kesetaraan gender di sekolah. Oleh karena itu, semestinya para guru menyadari ketimpangan gender yang terjadi di sekolah baik dalam kurikulum, materi pelajaran, metode, media, interaksi antar siswa, serta perlakuan guru terhadap siswa, dan kemudian berupaya untuk tidak meneruskan sosialisasi ketimpangan gender tersebut.

Untuk mengeliminasi ketimpangan gender dalam pendidikan sekolah, di beberapa negara, misalnya di Inggris sebagaimana sudah dikemukakan di atas, berbagai usaha telah dilakukan, dan yang cukup berhasil adalah dengan memasukkan pembahasan gender di dalam mata pelajaran. Untuk Indonesia, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas upaya eliminasi dapat dilakukan

* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2003 di Padang

** Dosen/Peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

dengan merevisi buku-buku dan materi pelajaran yang masih bias gender, serta, menumbuhkan sensitifitas gender para pengelola pendidikan terutama para guru. Di samping itu, harus ada pedagogi yang kritis di mana para guru akan senantiasa menumbuhkan daya kritis siswanya terhadap persoalan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya para guru di dalam pengajarannya tidak mempunyai sikap yang konvensional sehingga mereka tidak lagi meneruskan nilai-nilai yang bias gender.

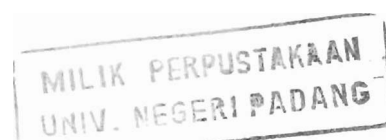
F. PENUTUP

Meskipun dalam perjalanan waktu nampak ada peningkatan jumlah perempuan bersekolah, dan jenjangnya semakin tinggi, perbandingannya dengan laki-laki masih jauh dari kesetaraan. Di samping itu, pendidikan sekolah belum sepenuhnya dapat mengeliminasi stereotipe gender, malah ada kecenderungan mempertahankan dan memperkuatnya, karena ia dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Dalam konteks inilah, pendidikan sekolah itu melalui materi mata pelajaran yang disajikan bahkan turut serta menyebarkan ideologi yang bias gender, bukannya mengkritisi dan mengubahnya. Oleh karena itu tidaklah sulit untuk memahami bahwa mengapa pendidikan lebih mengekalkan peran gender ketimbang menolaknya. Kebanyakan guru (yang pernah diteliti) belum menyadari diskriminasi yang dihadapi perempuan sebagai gender dan tidak mampu menolak stereotipe yang bersifat merusak dalam materi pelajaran. Pilihan karir yang tersedia bagi perempuan, lingkungan sekolah yang melakukan diskriminasi, semata-mata karena mereka tidak memahaminya.

Perlu disadari bersama bahwa sesungguhnya pendidikan yang bias gender itu memiliki kecenderungan untuk menghadapi kegagalan dalam mempersiapkan dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia suatu Negara, karena pendidikan yang demikian telah mengabaikan lebih dari separuh potensi sumber daya manusianya yaitu kaum perempuan.

* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2003 di Padang

** Dosen/peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP



189/K/2006-M 2(2)

10
305.3
Fat
M.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis (penyadur).2002. "Apa Yang Disebut dengan Kurikulum?". *Jurnal Perempuan* Nomor 23 tahun 2002. Halaman 35-48
- Budiman, Arief. 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peranan Wanita dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Diarsi, Myra. 1990. "Ideologi gender dalam pendidikan" dalam Nurhadi, toeti Herati *Et al (ed). Dinamika Wanita Indonesia*. Seri 01 multidimensional. Jakarta: PPSW. Hlm. 109 - 115
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- 1998a. "Diskriminasi dan Beban Kerja perempuan: Perspektif Gender". Dalam Baidar (ed), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta:CIDES-Ull.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia
- Hamalik, Oemar. 1995. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Illich, Ivan. 1982. *Bebas dari Sekolah*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- International IDEA .2000. *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*. Stockholm: Ameenpro GraphicDesign and Printing
- Mosse, Julia Cleves. 1995. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muthali'in, Achmad. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rajab, Budi.2002. "Pendidikan Sekolah dan Perubahan Kedudukan Perempuan". *Jurnal Perempuan* Nomor 23 tahun 2002. Halaman 19-34
- Young, Kate. 1987. "Women"s education and training" dalam *Womens Education and british Aid Programme*. London: War on Want and World University Service (UK). Hlm. 3

* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Peran Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Instruksional Pendidikan. Kerjasama LP UNP dan LP UNJ tgl 8 Desember 2003 di Padang

** Dosen/Peneliti pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP

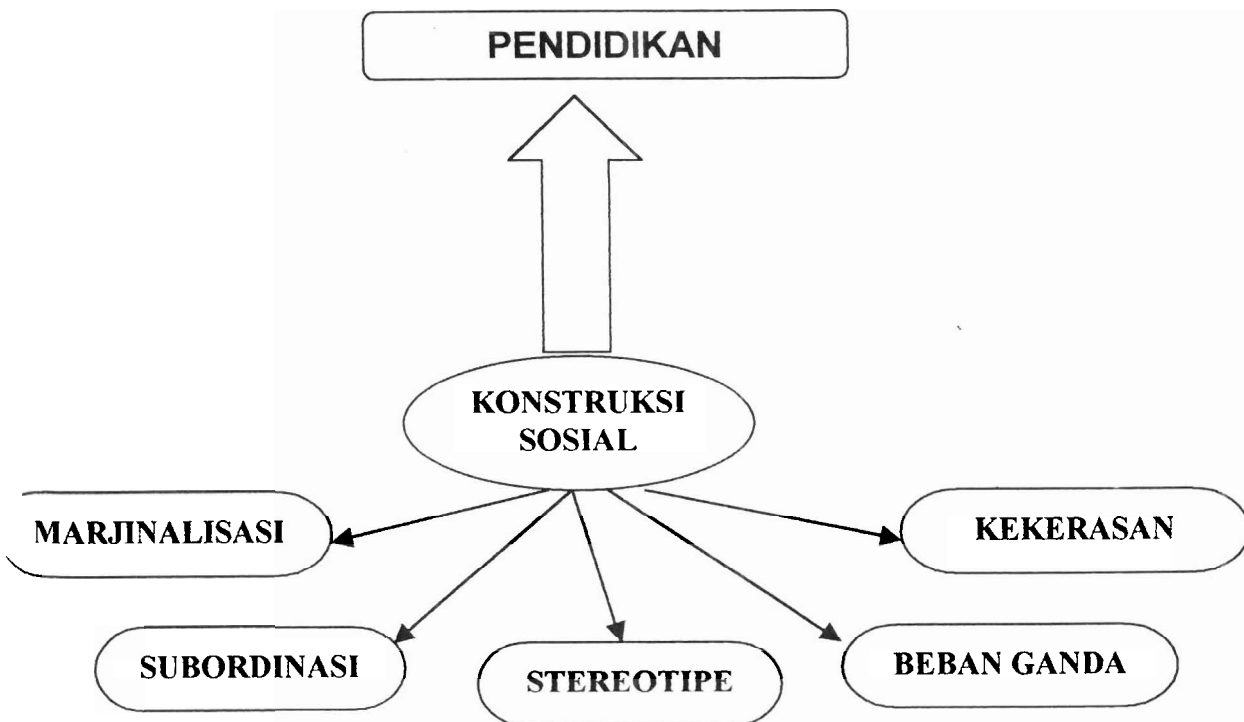
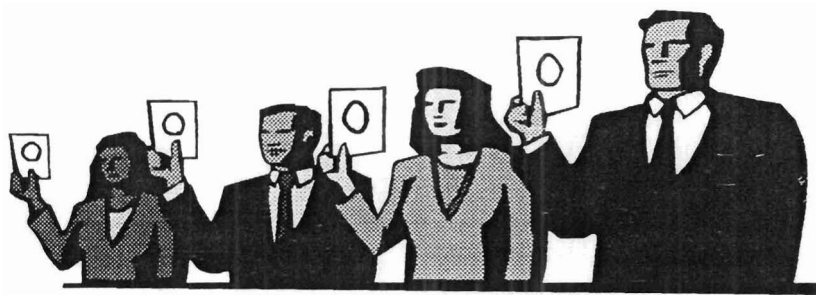


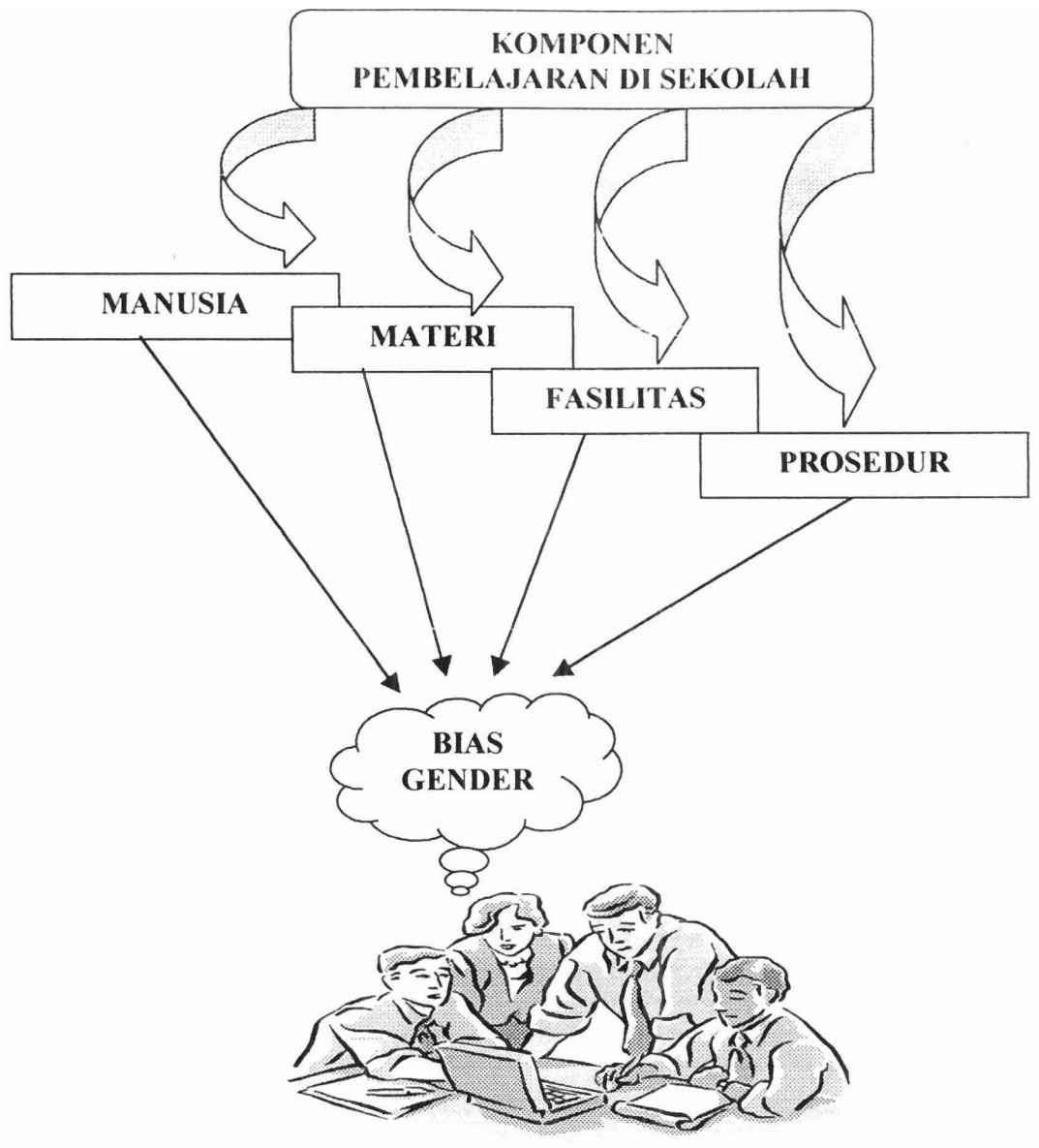
Mewujudkan Masyarakat Demokratis

Melalui Penelitian Pendidikan Yang Berperspektif Gender

Oleh: Fatmariza

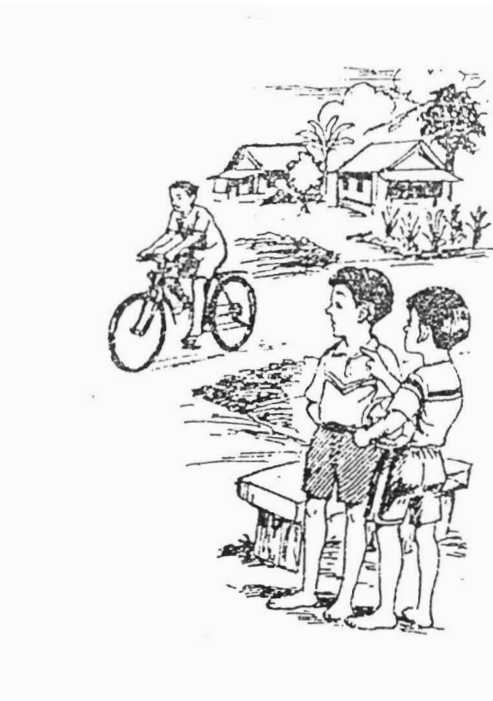
**MASYARAKAT
DEMOKRATIS**

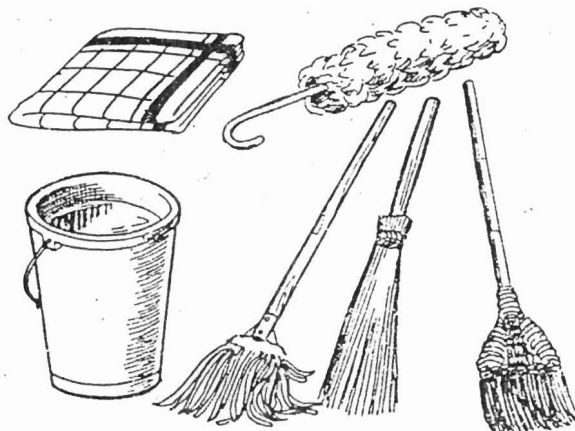




**PERLU PENELITIAN PENDIDIKAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER
AGAR LEBIH SEPARUH POTENSI SDM TIDAK TERBAIKAN**







MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG